

**PENGARUH KOORDINASI OLEH KEPALA DINAS TERHADAP  
EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
MAJALENGKA**

**Ratna<sup>1</sup>, Ratih Intan Lestari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Prostudi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas  
Majalengka

**Email:** ratnasukmayanti@gmail.com

**ABSTRACT**

*The work effectiveness condition is still not significant, it can be seen from several indicators that there are still employees who finish the work not on time, there are still employees who have not provided maximum results, there are still employees who lack innovation in the execution of work. The reason is allegedly because the Head of Service has not been optimal in supervising the implementation of work, allegedly the Head of Service has not been optimal in carrying out scheduled coordination. The research method used is quantitative descriptive method. The population in this study were 30 people with a sample of 28 people with a 5% error level using the Slovin formula. Data collection techniques are observation and questionnaires or questionnaires to research respondents. While the data processing in this study uses the SPSS Statistics 20.0 program. The results of the analysis and discussion obtained through observation and questionnaire can be concluded that the coordination carried out by the Head of Service has not been fully optimal so that it influences the low effectiveness of the work of employees in the One Door Investment Services and Integrated Services of Majalengka Regency. From the results of the analysis shows that the coordination of the Head of Office on the work effectiveness of employees there is a significant influence that is where  $r_{count}$  is greater than  $r_{table}$  or  $0.891 > 0.374$ . The coefficient of determination ( $R^2$ ) is 79.4% meaning that the work effectiveness of employees is influenced by the coordination of the Head Office and 20.6% is influenced by other factors and not examined. But it is expected that the One-Stop Integrated Investment and Services Office of Majalengka Regency in this case the Head of Service or top management in order to further improve coordination so that the level of work effectiveness of employees is more optimal and so as to facilitate the achievement of organizational goals.*

**Keywords:** Coordination, Employee Effectiveness

**ABSTRAK**

Kondisi efektivitas kerja masih belum optimal, hal ini terlihat dari beberapa indikator yaitu masih ada pegawai yang menyelesaikan pekerjaan tidak tepat waktu, masih ada pegawai yang belum memberikan hasil yang maksimal, masih

ada pegawai yang kurang inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Penyebabnya adalah diduga karena Kepala Dinas belum optimal dalam mengawasi pelaksanaan kerja, diduga Kepala Dinas belum optimal dalam melaksanakan koordinasi secara terjadwal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 orang dengan sampel 28 orang dengan taraf kesalahan 5% menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan penyebaran angket atau kuisisioner kepada responden penelitian. Sedangkan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS *Statistics* 20.0. Hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh melalui observasi dan kuisisioner dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas belum sepenuhnya optimal sehingga berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa koordinasi Kepala Dinas terhadap efektivitas kerja pegawai terdapat pengaruh yang signifikan yaitu dimana  $r_{hitung}$  lebih besar daripada  $r_{tabel}$  atau  $0,891 > 0,374$ . Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu 79,4% artinya efektivitas kerja pegawai dipengaruhi oleh koordinasi Kepala Dinas dan 20,6% dipengaruhi faktor lain dan tidak diteliti. Tetapi diharapkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dalam hal ini Kepala Dinas atau pucuk pimpinan supaya lebih meningkatkan koordinasi sehingga tingkat efektivitas kerja pegawai lebih optimal serta supaya dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan organisasi.

**Kata Kunci:** Koordinasi, Efektivitas Kerja

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pelaksanaan administrasi Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dibentuk

dan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah.

Dalam proses pembentukan, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dimulai dengan adanya keinginan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan secara maksimal yaitu dengan dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu (BPT) pada bulan Maret 2008 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka. Namun dalam perkembangannya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dimana terjadi perampangan perangkat daerah maupun susunan organisasi lembaga teknis daerah maka Badan Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Majalengka digabung sehingga nomenklaturnya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pada bulan Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Dengan Pesatnya perekonomian dan sesuai dengan kebutuhan investasi di Kabupaten Majalengka dimana terjadi perubahan nomenklatur dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, akan bergantung pada peran dari seorang pelaksana yang melakukan semua proses kerja. Dalam hal ini, tingkatan antara lower, middle dan top manajemen harus menjalin kerjasama yang baik. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai, yaitu terlaksananya koordinasi

dengan baik, karena koordinasi merupakan bagian terpenting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya.

Koordinasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Dengan berjalannya koordinasi, sangat diperlukan untuk mencegah adanya kecacauan, atau ketidakseimbangan pada proses pekerjaan, sehingga terarah, terintegrasi dan lebih mempermudah para pegawai dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat organisasi harus memperhatikan sumber daya manusia atau pegawainya. Efektivitas kerja menjadi tolok ukur keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya dari segi tepat waktu, tepat biaya, dan tepat tenaga. Efektivitas kerja, menuntut pegawai supaya bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan sebagai gambaran apakah kegiatan berhasil dilaksanakan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan dengan waktu yang telah ditetapkan bersama sebelumnya.

Berkaitan dalam pencapaian efektivitas kerja pegawai, pimpinan harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai contoh dengan cara

memberikan arahan kepada bawahan, selalu memberikan komunikasi dua arah, mengontrol kegiatan bawahan apakah sesuai dengan apa yang hendak dicapai atau tidak. Oleh sebab itu dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan koordinasi yang dijalankan dengan baik untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat tiga jenis bidang kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. Yaitu bidang pengembangan penanaman modal, bidang pelaporan dan pengendalian penanaman modal dan bidang pelayanan perizinan terpadu. Dalam hal ini, pelaksanaan koordinasi internal harus berjalan dengan baik supaya kegiatan organisasi dapat terselesaikan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan bupati.

Sehingga jelas bahwa koordinasi harus dilaksanakan dengan baik antara yang memberikan perintah dengan yang diberikan perintah supaya terjalannya sinkronisasi demi tercapainya tujuan bersama.

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka memperlihatkan masih rendahnya efektivitas kerja pegawai, hal ini terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Masih ada beberapa pegawai yang belum menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal, hal ini bisa menyebabkan lambatnya kinerja organisasi.
2. Masih ada beberapa pegawai yang belum mampu memecahkan persoalan organisasi secara terbuka, hal ini dilihat bahwa masih ada pegawai yang kurang bertanggungjawab terhadap tugasnya.
3. Masih ada beberapa pegawai yang kurang inisiatif dalam pelaksanaan pekerjaan, hal ini terlihat bahwa pegawai belum peka terhadap situasi dalam lingkungan pekerjaannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menduga bahwa Kepala Dinas belum optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, diantaranya :

1. Diduga Kepala Dinas masih belum optimal dalam mengawasi pelaksanaan kerja pegawai.
2. Diduga Kepala Dinas masih belum optimal dalam melaksanakan koordinasi secara terjadwal.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti perlu melakukan kajian secara ilmiah mengenai Pengaruh Koordinasi Oleh Kepala Dinas Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan sejumlah data dengan tujuan tertentu. Dikatakan ilmiah berarti penelitian tersebut berlandaskan pada sifat keilmuan yakni rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode survey, yaitu penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan mengambil data

yang terjadi pada saat observasi dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh antar variabel, dalam hal ini pengaruh koordinasi oleh Kepala Dinas terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dengan mengolah dan menganalisis data kuantitatif melalui pendekatan statistik parametrik.

### C. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Koordinasi Kepala Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka mencapai angka 76,19% berada pada kategori baik. Hal ini mengisyaratkan bahwa Koordinasi Kepala Dinas memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai yang dibentuk berdasarkan dimensi hierarki manajerial, aturan dan prosedur, rencana dan penetapan tujuan.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa efektivitas kerja pegawai pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten

majalengka mencapai angka 75,78% dengan kategori baik. Hal ini menyatakan bahwa efektivitas kerja pegawai dinilai baik dan berdasarkan dimensi produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan. Pembahasan verifikatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, serta dikaji sesuai hasil analisis jalur (*path analysis*) dan pengujian hipotesis.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara Koordinasi Kepala Dinas terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. Dari hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh  $Y = 4,685 + 0,969 X$  yang artinya bahwa setiap satu poin skor pada variabel efektivitas kerja pegawai dipengaruhi oleh koordinasi kepala dinas sebesar 0,969. Untuk koordinasi kepala dinas diperoleh nilai sebesar 0,969, hal ini berarti bahwa setiap penambahan nilai +1 poin, maka efektivitas kerja pegawai akan naik sebesar 0,969. Jadi semakin baik koordinasi kepala dinas maka semakin baik pula efektivitas

kerja pegawai. Disamping itu, berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,891 sehingga koefisien determinasinya adalah 0,794. Hal ini berarti bahwa 79,4% variasi nilai efektivitas kerja pegawai ditentukan oleh koordinasi kepala dinas.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka diperoleh suatu gambaran bahwa variabel koordinasi kepala dinas sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran secara umum mengenai Koordinasi Kepala Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka yang ditunjukkan oleh hasil penelitian yang diterapkan sudah baik. Hal ini dapat dilihat pada skor respon mengenai koordinasi secara keseluruhan sebesar 76,19% yang termasuk dalam kategori baik.

2. Gambaran tingkat Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka yang ditunjukkan oleh hasil penelitian yang diterapkan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari skor respon mengenai efektivitas kerja pegawai secara keseluruhan yaitu sebesar 75,78% yang termasuk dalam kategori baik.

1. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan analisa *Pearson Product Moment*, yang menunjukkan kekuatan antara Koordinasi Kepala Dinas dengan Efektivitas Kerja, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat korelasi positif antara variabel X dengan variabel Y yaitu sebesar 0,891. Berdasarkan pedoman penafsiran koefisien korelasi menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut sangat kuat. Dari analisis koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 0,794 (79,4%). Sedangkan sisanya sebesar 20,6% adalah disebabkan

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil perhitungan uji t, menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $10,023 > 2,056$ . Dengan demikian, hipotesis yang diajukan “terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Koordinasi Kepala Dinas terhadap Efektivitas Kerja Pegawai” diterima.

#### E. Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rhineka Putra
- Gibson, Ivancevich, Donnely. 2017. *Organisasi*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Handyaningrat, Suwarno. 1992. *Adminisrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Haji Masagung
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan, SP. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*,. Jakarta : Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan pengawasan*. Bandung : Refika Aditama
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Jakarta : Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Riduwan, dan Sunarto. 2012. *Pengantar Statistika (Untuk Penelitian)*. Bandung : Alfabeta
- Sadler, Philip. 1994. *Mendesain Organisasi*. Penerjemah : Fauzi bustami. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* . Jakarta : Rineka Cipta



- \_\_\_\_\_. 1988. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung
- Silalahi, Ulber. 2017. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : PT Refika aditama
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ke-23. Bandung : Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan ke-23. Bandung : Alfabeta
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : GMUP
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1992. *Sistem Administrasi Negara Indonesia, Jilid II*. Jakarta : Haji Masagung
- Usmara. 2003. *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses*. Jogjakarta : Penerbit Amara Books